BAB II

KONDISI DI JAWA PADA TAHUN 1916-1918

A. Situasi Hindia Belanda Selama Perang Dunia 1

Perang Dunia 1 (1914-1918) menyebabkan kekacauan bagi dunia, tidak terkecuali Belanda. Hubungan yang terjadi antara negeri penjajah dan daerah jajahan mengalami gangguan. Pelayaran antara Indonesia dan Eropa terganggu oleh perang ini, komunikasi pun terhambat. Meskipun Belanda bersikap netral dalam Perang Dunia I, investasi Jerman yang besar di Belanda, ditambah dengan hubungan perdagangan yang erat, memaksa Inggris memblokade pelabuhan-pelabuhan Belanda untuk melemahkan Jerman.[19]

Dalam perang, Belanda hanya menjadi penonton. Belanda selalu waspada terhadap serangan Jerman, khusunya di awal perang. Namun ancaman terhadap kedaulatan muncul dari Inggris dan AS yang memblokade kapal dagang dan kargo untuk memutus upaya perang pihak Jerman. Hal ini menyulut ketegangan antara Belanda dan kekuatan Sekutu. Hal itulah yang menyebabkan Belanda tidak leluasa atau terbatasi untuk melakukan hubungan dengan dunia luar dalam menjalankan aktivitas maupun kerjasama apapun, dengan kata lain mereka seperti terisolir. Keadaan ini menyebabkan besarnya pengeluaran negara selama perang yang tidak sebanding dengan pendapatan negara. Hal ini menjadi alasan bagi negeri Belanda untuk membuat kebijakan

[19] Kees Van Dijk, *Hindia Belanda dan Perang Dunia I 1914-1918* (Jakarta: Banana-KITLV, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menutupi defisit anggaran yang terjadi selama perang bergulir. Hal ini diberlakukan bukan hanya di negeri Belanda melainkan juga tanah jajahan mereka, tak terkecuali pemerintah Hindia Timur Belanda. Anggaran belanja militer kolonial meningkat sedangkan anggaran belanja untuk kesejahteraan dikurangi, harga barang-barang naik dan kesejahteraan rakyat Indonesia merosot. Perang juga menimbulkan masalah lain seperti para jemaah haji yang terlantar di Mekah.[20]

Berbeda dengan negara Induk yang mengalami ketegangan akibat blokade pihak sekutu yang menganggu dan hampir melumpuhkan perekonomian negara, justru Perang Dunia I yang baru saja pecah membuat pemerintah kolonial di Hindia Belanda bernapas lega. Pemerintah kolonial semakin longgar mengendalikan keadaan politik di Indonesia akibat Eropa dilanda perang. Kemerdekaan politik dan ekonomi yang didapatkan Hindia Belanda, hal ini muncul karena buruknya saluran komunikasi dengan negara induk. Pemerintah optimis dapat membawa kemajuan dan semakin kokoh di Hindia Belanda. Sejak lama Belanda berangan-angan untuk menguasai Indonesia, dengan menjadikan Indonesia kelak negara bagian. Hal ini tercermin dari kokohnya bangunan-bangunan Indonesia yang didirikan oleh Belanda, mereka beranggapan akan selamanya berada di Indonesia.

Selama Perang Dunia 1 memang merugikan berbagai sektor tetapi menguntungkan bagi pelaku industri lokal. Dengan terganggunya impor menyebabkan harga barang-barang impor seperti tekstil dan peralatan naik.

[20] M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Yogyakarta: Serambi, 2005), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu mendorong tumbuhnya industri dalam negeri, maka berkembanglah beberapa industri lokal pengganti impor. Para pelaku industri lokal ini dapat menikmati hari-hari mereka dapat memperoleh keutungan lebih. Sebelumnya mereka bahkan tidak dapat bersaing dengan dominasi ekonomi importir yang ada sebelumnya. Akan tetapi industri yang mulai tumbuh itu akan runtuh ketika perang berakhir dan era 1920-an perindustrian Eropa bangkit kembali.[21] Sektor ekspor kolonial tidak ambruk dan perang menawarkan prospek ekonomi baru. Itulah keuntungan yang didapat pemerintah Hindia Belanda, mereka memanfaatkan situasi perang untuk memperoleh kemerdekaan politik dan ekonomi, di tengah kondisi kesejahtraan rakyat yang merosot tajam.

Lapangan investasi dan penghasil komoditi ekspor sudah bergeser ke daerah luar Jawa sejak diberlakukannya politik etis tahun 1910. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan yang ada mengembangkan perusahan dan memperluas kegiatan-kegiatan mereka ke luar Jawa. Pada saat perang pemerintah kolonial dapat mengendalikan perekonomian Hindia Belanda tanpa campur tangan negara induk. Sebelum perang, masalah kesejahteraan menjadi yang utama, tuntutan-tuntutan pokok terhadap hutang kehormatan adalah di Jawa. Program kesejahteraan di Jawa ini dibiayai dengan mengharuskan daerah-daerah luar jawa memberikan subsidi bagi program-program tersebut. Sehingga dapat menghindarkan naiknya pajak yang sudah sangat memberatkan di Jawa. hal ini memaksa dikenakannya pajak yang

[21] Ibid., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi terhadap keuntungan-keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan di luar Jawa. Daerah-daerah luar Jawa tidak dikenakan pajak sampai tingkat yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup di Jawa. Ketika langkah-langkah kesejahteraan mulai dijalankan di Jawa, maka orang-orang Sunda dan Jawa menyadari bahwa dana dan tenaga kerja diminta dari mereka untuk membiayai program-program baru tersebut.[22]

Selain untuk membiayai kesejahteraan pribumi, hasil dari pajak tersebut diberikan kepada negara induk. Namun buruknya komunikasi dengan negara induk, membuat pemerintah kolonial dapat mengatur penghasilan yang mereka terima tersebut untuk kebutuhannya sendiri, tanpa harus menyetorkan hasil pajak kepada negara Belanda. Ada dua jenis komoditi yang sangat penting menempatkan Indonesia pada garis depan bagi kepentingan perekonomian dunia adalah minyak bumi dan karet, yang kebanyaakan dihasilkan oleh daerah-daerah luar Jawa. Dan selama perang berlangsung, Hindia Belanda tetap memiliki peran sentral terhadap ekspor kedua jenis komoditi tersebut. Ketika kondisi keuangan kolonial terancam setelah Perang Dunia 1, maka pajak yang dikenakan kepada orang Indonesia mengalami kenaikan yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan kurang penting daripada anggaran yang seimbang.[23]

Bagaimanapun juga hasil perang yang berlangsung belum dapat ditentukan, keadaan bisa saja menjadi tidak terduga. Pemerintah menjadikan perang sebagai kesempatan untuk mengendalikan politik Hindia Belanda.

[22] Ibid., 325.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah kolonial memunculkan kebijakan perlunya mengadakan Indie weerbaar (pertahanan Hindia) pada tahun 1916. Hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan wilayah Hindia Belanda jika perang semakin meluas hingga mencapai wilayah jajahan Belanda ini.

Terlebih lagi pemerintah kolonial, mulai menjalankan langkah pembentukan milisi Bumiputra (balatentara Jawa) ini untuk membantu menghadang kemungkinan invasi Jepang. Hindia Belanda juga menjadi incaran perang karena sejumlah alasan antara lain kecenderungan pro-Jerman oleh sebagian besar orang Islam Indonesia karena keterlibatan Turki dalam perang dan status Hindia Belanda sebagai stasiun penyelundupan yang dipakai kaum revolusioner India dan agen Jerman untuk menyingkirkan kekuasaan Inggris di Asia. Jemaah haji Indonesia dicurigai ikut berpartisipasi membantu Turki dalam perang, tidak sedikit dari mereka setelah menunaikan ibadah haji bergabung dengan pasukan Turki menghadapi tentara sekutu, atau bahkan ibadah haji digunakan sebagai alasan pergi ke Turki untuk berjihad.[24]

Sebenarnya gagasan pembentukan milisi paruh waktu yang terdiri atas orang-orang Indonesia telah muncul pada tahun 1913 dan telah diajukan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan, namun usulan tersebut mendapat penolakan oleh pemerintah pada awal tahun 1914. Namun setelah pecahnya Perang Dunia 1, gagasan tersebut dibicarakan kembali. Selain karena milisi merupakan kekuatan pertahanan yang lebih murah daripada memperbesar

[24] Kees, *Hindia Belanda dan Perang Dunia I*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasukan profesional.[25] Dengan kata lain, pemerintah ingin memanfaatkan pribumi untuk mempertahankan rezim penjajahan mereka.

Masalah Indie weerbaar merupakan persoalan pertahanan, tetapi segera berkaitan erat dengan asal usul munculnya Volksraad (dewan rakyat). Pembentukan milisi semacam ini mulai dikampanyekan oleh pemerintah, organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dapat berdiri setelah politik etis diterapkan pun bereaksi, ada yang mendukung ada pula yang menentang. Budi Oetomo yang memiliki anggota kalangan orang Jawa yang berdinas pada tentara kolonial ikut mengkampanyekan pembentukan milisi Indie weerbaar. Kecaman-kecaman pun muncul yang ditujukan kepada Budi Oetomo yang dianggap telah diatur oleh pemerintah. Berbeda dengan Budi Oetomo, Sarekat Islam mengambil sikap dengan menyuarakan bahwa rakyat Indonesia dapat diharapkan mempertahankan rezim penjajah hanya apabila mereka diwakili dalam pemerintahan, Budi Oetomo juga mendukung pandangan ini. Dengan Demikian, kampanye Indie weerbaar dengan cepat berubah menjadi isu perwakilan rakyat.[26]

Pada tahun 1916, suatu delegasi yang terdiri atas wakil-wakil Budi Oetomo, Sarekat Islam, Regenten bond, dan organisasi-organisasi serupa dari empat kerajaan Jawa berkunjung ke negeri Belanda. Mereka mengajukan Petisi kepada Ratu Wilhelmina (m. 1890-1948) dan berkeliling negara itu guna menyalurkan aspirasi tentang pembentukan Volksraad di Hindia Belanda pada instansi-instansi terkait. Ketika parlemen Belanda bertindak menangani

[25] Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 358.
[26] Ibid., 358-359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah-masalah itu, maka rancangan undang-undang bagi pembentukan milisi pribumi tidak disetujui, tetapi pada awal bulan Desember 1916 rancangan undang-undang bagi pembentukan Volksraad disetujui. Delegasi Indie weerbaar ini kembali dari negeri Belanda pada tahun 1917. Undang-undang tentang pembentukan Volksraad disahkan pada tanggal 16 Desember 1916, yang kemudian direalisasikan pelaksanaannya di Hindia Belanda pada tanggal 1 Agustus 1917, dan dibuka secara resmi pada tanggal 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal J.P. Graaf (Pangeran) van Limburg Stirum (m. 1916-1921).[27]

Ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menyampaikan gagasannya dalam sidang Liga Bangsa-Bangsa tentang hak menentukan nasibnya sendiri bagi bangsa-bangsa yang terjajah.[28] Gagasan ini mempengaruhi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda sehingga menimbulkan kesadaran tentang hak orang Indonesia untuk menentukan nasibnya dan bebas dari penjajahan Belanda.

Pada tahun 1917 atmosfer optimisme di Hindia Belanda berubah menjadi keresahan dan ketidakpuasan. Setelah Perang Dunia I berakhir situasi kembali stabil seperti suasana politik dan ekonomi sebelum perang. Hal ini membuat industri lokal ini kemudian bertumbangan pada saat berakhirnya perang karena impor kembali normal. Pada 1917 optimisme tahun-tahun pertama perang menghilang. Pembatasan dagang, perang laut, kurangnya tonase di seluruh dunia menyebabkan peluang ekspor menyusut. Propaganda

[27] D. M. G. Koch, *Menuju Kemerdekaan: Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942* (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1951), 62.
[28] Kees, *Hindia Belanda dan Perang Dunia I*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunis telah meradikalkan gerakan nasionalis. Pada 1918 terlihat bahwa koloni sepertinya akan menyerah. Ekspor berhenti. Kelaparan adalah bahaya di depan mata. Makin banyak keresahan di kalangan penduduk kolonial, angkatan darat, dan angkatan laut. Penguasa kolonial meminta bantuan gerakan kebangsaan, menawarkan konsesi politik yang sangat besar, yang kemudian segera terlupakan begitu perang berakhir.

B. Perkembangan Organisasi Pergerakan Nasional

Munculnya organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari diterapkannya politik etis oleh kolonial dibidang pendidikan. Pemerintah kolonial meningkatkan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Awalnya tiga hoofdenscholen (sekolah para kepala) yang lama di Bandung, Magelang dan Probolinggo disusun kembali menjadi sekolah-sekolah yang benar-benar direncanakan untuk menghasilkan pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA (opleidingscholen voor inlandsche ambtenaren / sekolah pelatihan untuk para penjabat pribumi), kemudian sekolah dokter Jawa di Weltevreden diganti menjadi STOVIA (school tot opleiding van inlandsche artsen / sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi).[29]

Pada tahun 1914 semua sekolah dasar dengan sistem pendidikan pribumi, yang tidak memiliki kesempatan untuk meneruskan ke pendidikan selanjutnya seperti sistem sekolah Eropa yang paralel, diubah menjadi sekolah-sekolah Hollandsch-Inlandsche (HIS / Belanda-Pribumi). Sekolah rendah Eropa memang sudah dibuka sejak tahun 1908 namun masih

[29] Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibedakan berdasarkan suku bangsa misalnya Hollandsch-Chineesche (Belanda-Cina), namun setidaknya kini semuanya mengarah ke pendidikan Eropa tingkat lanjutan.[30]

Di atas tingkatan HIS pemisahan ras dalam pendidikan sudah tidak ada, MULO (meer uitgebreid lager onderwijs / pendidikan rendah yang lebih panjang) semacam SMP, didirikan pada tahun 1914 untuk orang-orang Indonesia, Cina dan Eropa yang telah menyelesaikan sekolah dasar mereka masing-masing. Namun hanya orang-orang Indonesia golongan atas yang mampu menyekolahkan anak mereka di MULO. Kemudian tahun 1919, AMS (algemeene middelbaren scholen / sekolah menengah umum) semacam SMA, didirikan untuk membawa para siswa memasuki perguruan tinggi. Hingga saat itu belum ada pendidikan tingkat perguruan tinggi di Indonesia. Hanya sejumlah kecil orang Indonesia yang mendapat kesempatan memasuki perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya telah berhasil menembus sistem Eropa menuju HBS (hoogere burgerschool / sekolah atas untuk kelas menengah) dan kemudian ke perguruan tinggi di negeri Belanda.[31]

Masih banyak lagi sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh pemerintah kolonial di Indonesia. Dari sekolah-sekolah itulah muncul orang-orang terpelajar yang sadar akan penjajahan di negerinya sendiri. Setidaknya ada empat organisasi yang berorientasi sebagai pergerakan politik terkemuka

[30] Ibid., 333.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat itu (1916-1918) yaitu Boedi Oetomo (BO), Centraal Sarekat Islam (CSI), Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) dan Insulinde.

1. Insulinde

Insulinde merupakan organisasi penerus Indische Partij yang ditolak keberadaannya di Indonesia. Indische Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang indo dengan bumi putera. Tujuan Indische Partij ialah "untuk membangunkan patriotisme semua Indiers terhadap kepada tanah air, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air "Hindia" dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka." (Sartono Kartodirjo, 1975 : 191).[32] Mengingat tujuan tersebut yaitu bercita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang dilakuan melalui proses menumbuhkan dan membangun Patriotisme bagi semua orang Indonesia, baik keturunan Arab, India, Belanda, Cina dan lain-lain, maka organisasi ini ditolak oleh Gubernur Jenderal Alexander W. F. van Idenburg (1909-1916) pada 4 maret 1913. Pada tanggal 11 Maret 1913 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peringatan kepada Indische Partij dan organisasi ini tetap dinyatakan sebagai partai terlarang.

Keadaan organisasi Indische Partij semakin lama semakin mundur. Mundurnya Indische Partij bukan karena ditinggalkan oleh ketiga tokoh pendirinya yang diasingkan ke negeri Belanda, melainkan karena adanya

[32] Sartono Kartodirdjo, *Kolonialisme dan Nasiomalisme di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 1975), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Tiga serangkai itu pendiri IP adalah E.F.E. Dowes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hajar Dewantara). Akibatnya hampir setiap langkah geraknya tertutup, walaupun penerusnya berusaha mengubah nama organisasi, yaitu dari Indische Partij menjadi "Partai Insulinde".

Asas Insulinde yang utama dalam programnya tertera yaitu mendidik suatu nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita- cita persatuan bangsa", kepada anggota-anggota ditekankan supaya menyebut dirinya "Indiers", orang Hindia (Indonesia).

Para tokoh Indiche Partij kemudian kembali ke Hindia Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Limburg Stirum. Dr. Cipto sendiri telah kembali pada tahun 1914 karena alasan kesehatan, Dowes Dekker pada tahun 1918 dan Suwardi sampai tahun 1919.[33] Dr. Cipto menjadi anggota pengurus pusat Insulinde untuk beberapa waktu dan melancarkan propaganda untuk Insulinde, terutama di daerah pesisir utara pulau Jawa. Selain itu, propaganda Cipto untuk kepentingan Insulinde dijalankan pula melalui majalah Indsulinde yaitu Goentoer Bergerak, kemudian surat kabar berbahasa Belanda De Beweging, surat kabar Madjapahit dan surat kabar Pahlawan.

Akibat propaganda Dr. Cipto, jumlah anggota Insulinde pada tahun 1915 yang semula berjumlah 1.000 orang meningkat menjadi 6.000 orang pada tahun 1917. Jumlah anggota Insulinde mencapai puncaknya pada

[33] Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oktober 1919 yang mencapai 40.000 orang. Insulinde di bawah pengaruh kuat Cipto menjadi partai yang radikal di Hindia Belanda.

Pengaruh Serekat Islam yang kuat telah menarik orang-orang Indonesia, sehingga Partai Insulinde menjadi semakin lemah. Kembalinya Douwes Dekker dari negeri Belanda tahun 1918 tidak begitu mempunyai arti bagi partai insulinde. Pada 9 Juni 1919 Insulinde mengubah nama menjadi Nationaal-Indische Partij (NIP). Dalam perkembangannya partai ini tidak mempunyai pengaruh kepada rakyat banyak bahkan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang- orang terpelajar.[34]

2. Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV)

Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, H.J.F.M. Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV / Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Anggota awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda. Sneevliet bersama dengan orang sosialis lainnnya seperti J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P.Bregsma mendirikan ISDV pada tanggal 9 Mei 1914 di Surabaya.[35]

Pada tahun itu juga, Sneevliet dan kawan-kawan giat melebarkan jaringan-jaringannya di kota Semarang dan Surabaya. Sebagai seorang marxis yang sosialis, Sneevliet bergabung dengan serikat buruh kereta api dan trem atau VSTP (Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel / Serikat Buruh

[34] Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 193.
[35] Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kereta Api dan Trem) yang beranggotakan pribumi dan orang Belanda. Sneevliet kemudian berhasil mengubah halauan VSTP yang sebelumnya moderat menjadi lebih radikal.

Sneevliet telah berhasil memikat beberapa orang pengurus dan anggota Serikat Islam di antaranya Semaun. Semaun adalah seorang pemuda Jawa buruh kereta api yang menjadi anggota SI cabang Surabaya pindah ke Semarang pada tahun 1915, di mana Sneevliet aktif dalam VSTP[36] dan kemudian ia bergabung dengan ISDV. ISDV yang berpusat di Semarang sepenuhnya merupakan kelompok yang sangat anti kapitalisme dan cenderung responsif-radikal. Bersama ISDV, Sneevliet juga aktif dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda yang notabene adalah bangsanya sendiri. Kritikan tajam seringkali ia layangkan pada pemerintah dan elit pejabat yang bertindak sebagai kaum borjuis dalam kacamata marxis.

Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.

[36] Ibid., 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota ISDV hampir seluruhnya orang Belanda, tetapi organisasi ini ingin memperoleh basis di kalangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1915-1916 partai ini menjalin persekutuan dengan Insulinde. Setelah kerjasama mulai berjalan, orang-orang sosialis radikal (ISDV) mulai menyadari bahwa Insulinde bukan pilihan yang tepat karena perkembangan ISDV sangat lambat. Orientasi pergerakan Insulinde terhadap Indo-Eropa (eurasia) dan kelas menengah menyebabkan organisasi sulit menjangkau massa Indonesia. Sedangkan ISDV hendak menjadikan Insulinde sebagai jembatan untuk propaganda sosialisme ke massa rakyat Indonesia. Selain itu, meskipun para pemimpin Insulinde punya gagasan yang radikal, tetapi mereka sangat jauh dari kaum pekerja. Bahkan, usaha Sneevliet untuk membawa Tjipto ke kiri mengalami kegagalan. Anggota Insulinde yang berjumlah 6.000 orang, termasuk orang Jawa terkemuka, tetapi organisasi ini jelas bukanlah alat yang ideal untuk mendapatkan basis rakyat.[37] Salah satu keputusan penting dari kongres ISDV yang berlangsung pada bulan Juli 1916 adalah penghentian kerjasama dengan Insulinde. Selain itu, sebagai langkah susulan atas keputusan itu, maka kongres juga memerintahkan anggota ISDV untuk segera keluar dari Insulinde.

Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka) dengan editornya adalah Adolf Baars. Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, "Soeara Merdeka". Pecahnya revolusi Rusia yang

[37] Ibid., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan Tsar turun takhta dan pemerintahan profesional Rusia mulai dibentuk. Sneevliet pun tergerak untuk menuliskannya dalam rangka membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Ia menulis artikel berjudul Zegepraal (kemenangan) dan menyerahkannya pada redaksi De Indier agar diterbitkan. Meski tulisan Sneevliet telah diperhalus oleh redaksi De Indier, isi dari Zegepraal masih terdengar kasar bagi para penjajah. Oleh karena artikel Sneevliet yang berjudul Zegepraal tersebut, Sneevliet diseret ke pengadilan dengan tuduhan melakukan penghasutan dan kegiatan subversif terhadap pemerintah. Sneevliet kemudian dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara yang setelah itu ternyata dibatalkan. Pembatalan tersebut, tidak lain hanyalah sebuah taktik agar Sneevliet secepatnya pergi dari Hindia Belanda.

Setelah Revolusi Rusia 1917, ideologi radikal Sneevliet mendapat tempat yang luas di masyarakat, termasuk bagi militer angkatan laut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet dan ISDV di Surabaya.[38] Hal inilah yang kemudian membuat Belanda khawatir hingga akhirnya memutuskan untuk mengusir Sneevliet dari Hindia Belanda pada tahun 1918, para pemimpin ISDV ini dikirim kembali ke Belanda. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman

[38] Ibid., 361-362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara hingga 40 tahun. ISDV pun ditekan pemerintah sebelum kemudian dibubarkan.

ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra'jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerja di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota.

Kongres Komunis Internasional 5 Maret 1919 di Moskow, Rusia, menyerukan penyeragaman nama bagi semua gerakan Komunis sedunia. Pada kongres ISDV di Semarang 23 Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia yang menjadi cikal bakal PKI pada tahun 1924.[39] Partai kecil aliran kiri ini menjadi partai komunis pertama di Asia yang berada di luar negeri Uni Soviet[40] dan menjadi bagian dari Komintern.

3. Boedi Oetomo

Dalam penerapan politik ethis terkadung didalamnya usaha memajukan pengajaran dan pendidikan bagi generasi muda di Indonesia. Salah satu kendala dalam memajukan bidang pendidikan, masih terbatasnya anggaran dana untuk bidang tersebut. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi dr. Wahidin Sudirohusudo (1857-1917) terhadap kondisi anak-anak Indonesia yang masih mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan karena

[39] Ibid., 363.
[40] Ibid., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya dana belajar, sehingga melakukan kegiatan menghimpun dana dengan melakukan propaganda berkeliling di Jawa tahun 1906-1907.[41]

Wahidin berkeinginan menghimpun beasiswa agar dapat memberikan pendidikan modern atau Barat kepada golongan priyayi Jawa, dengan mendirikan badan pendidikan yang disebut Studie Fonds atau Dana Siswa, sebagai langkah pertama untuk menjunjung derajat martabat rakyat dan bangsa. Hal ini telah menggugah pikiran dan menggerakkan hati pemuda-pemuda pelajar School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten (STOVIA) yang progresif untuk membentuk suatu organisasi yang bertujuan lebih luas dari pada mendirikan studie fonds saja. Gerakan pendirian studie fonds ini kemudian disusul dengan didirikan organisasi Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.

Budi Utomo pada dasarnya tetap merupakan suatu organisasi priyayi Jawa. Jangkauan wilayah yang terbatas ini, menjadikan Budi Utomo dianggap sebagai organisasi yang bersifat kedaerahan. Organisasi ini secara resmi menetapkan bahwa bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura. Dengan demikian, mencerminkan kesatuan administrasi kedua pulau tersebut dan mencakup masyarakat Sunda yang kebudayaannya mempunyai kaitan dengan Jawa, meski yang dipakai sebagai bahasa resmi organisasi adalah bahasa Melayu. Budi Utomo tidak pernah memperoleh landasan rakyat yang nyata, jumlah keanggotaan tertinggi hanya 10.000 orang pada

[41] Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia*,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1909.[42] Peran Budi Utomo semakin memudar seiring berdirinya organisasi yang lebih aktif dan penting bagi pribumi yaitu organisasi yang bersifat politik. Dengan munculnya organisasi-organisasi baru tersebut menyebabkan Budi Utomo mengalami kemunduran. Anggota-anggota Budi Utomo yang merasa tidak puas akhirnya keluar dari organisasi itu kemudian masuk ke organisasi baru yang dianggap lebih menjanjikan.

Mulai pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, kelihatan ada usaha untuk mengembalikan kekuatan yang ada pada Budi Utomo. Tindakan politik pertama budi utomo bergema dalam kongresnya di Bandung (Agustus 1915) ketika mempersoalkan Milisi Bumiputera (Inlandsche Militie). Berdasarkan dengan akan adanya kemungkinan intervensi kekuasaan asing, meskipun Belanda dan Hindia Belanda tidak terlibat dalam berkobarnya PD I, ancaman peperangan berpengaruh terhadap penduduk Belanda di Hindia Belanda. Kekhawatiran bukan berasal dari tentara Jerman namun intervensi pasukan Jepang. Budi Utomo melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri,[43] dan yang pertama menyokong alasan wajib militer pribumi. Diskusi yang terjadi berturut-turut dalam pertemuan-pertemuan setempat sebaliknya menggeser perhatian rakyat dari soal wajib militer kearah soal perwakilan rakyat. Dikirimkannya sebuah misi ke negeri Belanda oleh Kote “Indie Weerbaar” untuk pertahanan Hindia. Dalam tahun 1916-1917 merupakan pertanda masa yang amat berhasil bagi Budi Utomo. Dwidjosewoyo sebagai wakil Budi

[42] Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 344.
[43] Ibid., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utomo dalam misi tersebut berhasil mengadakan pendekatan dengan pimpinan-pimpinan Belanda terkemuka.

Keterangan Menteri Urusan Daerah Jajahan tentang pembentukan *Volksraad* (Dewan Rakyat), yang waktu itu sedang dibicarakan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, dimana ia menekankan badan itu akan dijadikan Dewan Perwakilan Rakyat nanti. Hal ini disambut dengan sangat menggembirakan bagi anggota misi maupun Budi Utomo. Meski undang-undang wajib militer atau pembentukan suatu milisi gagal dipenuhi pemerintah Belanda, sebaliknya parlemen Belanda menyetujui undang-undang pembentukan *Volksraad* di Hindia Belanda, kemudian disahkan pada bulan Desember 1916. Menjelang pembentukan Volksraad, Budi Utomo segera membentuk sebuah Komite Nasional yang terdiri dari pemimpin-pemimpin perkumpulan-perkumpulan Indonesia untuk menghadapi pemilihan anggota *Volksraad.* Selain itu juga komite ini dibentuk untuk memusyawarahkan suatu program politik yang telah disiapkan oleh Budi Utomo yaitu mewujudkan pemerintahan parlementer berasas kebangsaan, peraturan pemilihan yang baik, persamaan hukum, perbaikan peraturan pengadilan bagi bangsa Indonesia dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan-perbedaan (diskriminasi) antara berbagai golongan rakyat.[44] Tetapi komite ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan akhirnya bubar.

[44] A. K. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Dian Rakyat, 2001), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktivitas-aktivitas itu memberi kesan kepada kaum elite di kalangan pemerintahan kolonial bahwa Budi Utomo adalah satu-satunya organisasi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebagai hasilnya partai kaum elite bekerja sama dengan Budi Utomo dalam kampanye pemilihan sehingga Budi Utomo dapat menduduki jumlah kursi yang nomor dua besarnya di antara anggota pribumi di dalam *Volksraad*. Wakil Budi Utomo cukup banyak yang masuk Volksraad, karena pemerintah tidak banyak menaruh curiga pada Budi Utomo karena sifatnya sangat moderat.

Di dalam sidang *Volksraad* wakil-wakil Budi Utomo masih tetap berhati-hati dalam melancarkan kritik terhadap kebijakan politik pemerintah. Para anggota pribumi yang lebih radikal dan juga anggota sosialis Belanda di dalam *Volksraad* melakukan kritik terhadap pemerintah. Berakhirnya Perang Dunia I dengan kekalahan Jerman, mengakibatkan kaum sosialis Jerman menggulingkan kekuasan raja dan mendirikan negara republik. Peristiwa revolusi sosial demokrat ini berpengaruh di Belanda, karena SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) di Belanda mengikuti kejadian di Jerman dengan berusaha mengulingkan sistem monarchi di Belanda yang di kenal sebagai krisis bulan November 1918.[45]

Upaya SDAP tersebut mengalami kegagalan, namun di Indonesia belum diketahui apakah kerajaan Belanda selamat. Dengan memanfaatkan kesempatan krisis tersebut, para anggota Volksraad yang radikal menuntut perubahan bagi Volksraad dan kebijakan politik Hindia Belanda. Unsur-unsur

[45] Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

radikal dalam Budi Utomo menjadi lebih berperan sejak krisis November tersebut. Di Volksraad Budi Utomo bersama-sama dengan Sarekat Islam, Insulinde dan ISDV membentuk berdiri badan Radicals Concentratie pada tanggal 16 November 1918, yang kemudian berganti nama menjadi Polieke Concentratie dengan tujuan akan menyusun Parlementaire Combinatie, untuk menuntut terbentuknya parlemen yang sejati[46], di samping itu dibentuk pula suatu pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen. Budi Utomo pun berperan aktif dalam aktivitas tersebut.

4. Centraal Sarekat Islam

Centraal Sarekat Islam merupakan keberlanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi (1868-1956) di Surakarta. Satu tahun kemudian namanya berubah menjadi Sarekat Islam. Samanhudi yang sebagian besar waktunya tersita untuk urusan dagang, pada tahun 1912 meminta HOS Tjokroaminoto untuk memimpin organisasi ini.[47] SI yang awal berdirinya tidak terburu untuk secepatnya memohon ijin kepada pemerintah tetapi mengutamakan konsolidasi organisasi. Tidak lama setelah masuknya Tjokroaminoto SI resmi dinyatakan berdiri dihadapan notaris pada 1912. Pada tahun 1913 SI memohon ijin pendirian kepada pemerintah, Gubernur Jenderal Idenburg memberi pengakuan resmi kepada SI, namun yang diperkenankan berdiri hanya untuk SI-SI lokal. Ini dilakukan agar SI tidak menjadi markas besar organisasi nasional, melainkan hanya kumpulan cabang yang otonom, sehingga SI lokal tidak dapat dikendalikan oleh SI pusat.

[46] Amelz, *HOS Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya* (Jakarta: Kartika Tama, 1971), 109.
[47] Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idenburg beranggap bahwa ia membantu para pemimpin pusat organisasi baru tersebut dengan tidak membebani SI pusat dengan tanggung jawab hukum atas kegiatan-kegiatan semua cabang SI.[48]

Pada tahun 1915 SI berganti nama menjadi Centraal Sarekat Islam dan memindahkan pusat yang semula berada di Surakarta ke Surabaya. Pada tahun 1916 CSI mengadakan kongres pertama di Bandung dan mulai menunjukkan sikap menjadi organisasi yang berorientasi politik bagi umat Islam yang radikal. Pada tahun 1917 kongres kedua diadakan di Jakarta merumuskan sikapnya sebagai pergerakan politik. Sedangkan kongres ketiga diadakan pada tahun 1918 di Surabaya.

Akibat keputusan Idenburg CSI semakin sulit melakukan pengawasan terhadap SI-SI lokal. Meskipun demikian SI-SI lokal mengalami perkembangan pesat, akibatnya orang-orang Belanda lainnya beranggapan bahwa pengakuan resmi Idenburg terhadap SI sama sekali keliru, bahkan menganggap arti SI sebenarnya "Salah Idenburg". SI berkembang pesat dan menjadi organisasi berbasis rakyat, pada tahun 1919 SI menyatakan mempunyai anggota dua juta orang. Tidak seperti Budi Utomo, SI berkembang ke daerah-daerah luar Jawa, tetapi Jawa tetap menjadi pusat kegiatannya.[49]

Pertentangan-pertentangan terjadi pada tubuh SI, perdebatan sengit dengan menyerang kepemimpinan CSI. Pertikaian intern ini dimulai karena Sarekat Islam ikut duduk dalam komite Indie Weerbaar yang mengirim utusan

[48] Ibid., 349.
[49] Ibid., 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke negeri Belanda untuk menyampaikan petisi kehadapan Ratu Wilhelmina (Januari 1917). Meskipun banyak yang menentang keikutsertaan SI dalam kampanye Indie Weerbaar serta menentang gagasan untuk duduk dalam Volksraad, terutama dari cabang Semarang. Namun, Abdul Muis (1890-1959) seorang Minangkabau yang menjadi wakil SI di dalam delegasi Indie Weerbaar ke negeri Belanda, menegaskan bahwa apabila ternyata Volksraad gagal, SI akan memberontak.[50]

Perpecahan di tubuh SI dimulai sejak ISDV melakukan infiltrasi sebagai anggota SI sejak tahun 1916. Tujuannya menyusup ke dalam tubuh SI adalah untuk menyebarkan paham sosialis kiri yang sangat radikal. Setelah gagal bekerjasama dengan Insulinde, perhatian ISDV mulai beralih kepada Sarekat Islam, satu-satunya organisasi yang memiliki pengikut terbesar di kalangan rakyat Indonesia.[51] Penyusupan yang dilakukan anggota ISDV ini membuat anggota SI menjadi lebih radikal. Banyak anggota SI juga menjadi anggota ISDV, ini akibat dari lemahnya peraturan SI yang tidak mengatur anggotanya tidak diperbolehkan menjadi anggota partai lain, ini merupakan kerugian bagi SI. Semaun dan Darsono menjadi anggota SI yang beraliran kiri dan radikal. Akibat dari infiltrasi ISDV menyebabkan ISDV di semarang yang memiliki anggota 1.500 orang pada 1916, berkembang pesat mencapai 20.000 orang pada tahun 1917, dan kesemuanya juga tercatat sebagai anggota SI. Peran Semaun sebagai ketua SI cabang Semarang memiliki andil besar, hal ini akibat Sneevliet telah berhasil mempengaruhi pengurus Sarekat Islam

[50] Ibid., 360.
[51] Ibid., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. SI mulai terpecah, SI cabang semarang yang beraliran kiri berusaha keras mendapatkan kekuasaan. Di Jawa Barat, Suatu cabang revolusioner rahasia yang diberi nama SI Afdeeling B (SI Seksi B) didirikan oleh Sosrokardono dari CSI dan beberapa orang aktivis lainnya pada tahun 1917.[52]

Di Volksraad, SI diwakili oleh Abdul Muis bersama dengan Abdul Rivai dari Insulinde, Dwidjosewoyo dan Radjiman Wediodiningrat dari BO. Gubernur Jenderal tidak puas karena orang-orang yang terpilih tidak terlalu berpengaruh sehingga menggunakan hak penunjukkan dan mengangkat Tjokroaminoto dari SI dan Tjipto Mangunkusumo dari Insulinde. SI yang bersama Budi Utomo, Insulinde dan ISDV menuntut terbentuknya parlemen yang sejati. Namun hal ini senantiasa ditunda pembahasannya. Oleh karenanya, muncul pandangan atau anggapan umum terhadap eksistensi Volksraad, dari hari ke hari semakin merosot. kekuasaan dan kewenangan Volksraad sangat lemah, karena banyak advis dan saran tidak diperhatikan, bahkan dikesampingkan oleh pemerintah dan penjajah Belanda. Akhirnya tanggal 25 November 1918 Tjokroaminoto menggeluarkan Mosi yang dikenal dengan “Mosi Tjokroaminoto dan kawan-kawan”. Hal itu membuat Gubernur Jenderal Limburg Stirum memberikan janji-janji November yang menyetujui pengalihan wewenang yang lebih luas kepada Volksraad dan perbaikan-perbaikan sosial lainnya yang tidak terperinci. Volksraad kelihatan semakin

[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan harapan.[53] Namun, Volksraad tidak pernah tumbuh menjadi parlemen yang sebenarnya.

C. Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad SAW di Jawa

Dalam masyarakat Jawa, terdapat stratifikasi sosial antara putihan dan abangan. Golongan putihan atau sering disebut santri / *wong* muslimin merupakan kelompok minoritas yang berusaha benar-benar menaati kewajiban-kewajiban Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua kelompok yang dapat dibedakan dalam golongan masyarakat ini yaitu kaum muslim pedesaan yang berorientasi pada pendidikan pesantren dan kaum muslim perkotaan yang sering berkecimpung di bidang perdagangan. Pada abad ke-20, kaum muslim perkotaan bersentuhan dengan gagasan-gagasan pembaharuan dan kemajuan.[54]

Kaum abangan merupakan suatu istilah Jawa untuk menyebut orang-orang muslim yang keislamannya tidak lebih daripada sekedar komitmen formal dan nominal saja. Kaum abangan merupakan mayoritas penduduk Jawa, pemikiran-pemikiran agama mereka cenderung bersifat mistik, relatif tidak memperdulikan tuntutan kewajiban-kewajiban upacara agama Islam, dan secara budaya terikat pada bentuk-bentuk seni Jawa seperti wayang yang pada dasarnya diilhami oleh nilai-nilai pra-Islam. Di antara kelompok ini, sebagian besar memandang Islam secara netral dan bersahabat, tetapi dengan semakin meningkatnya tekanan-tekanan Islam, beberapa diantara mereka menjadi memusuhi Islam.

[53] Ibid., 361.
[54] Ibid., 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalangan priyayi Jawa (penjabat pemerintahan) yang maju memandang pendidikan sebagai kunci kemajuan. Pada awal abad ke-20, pendidikan Barat tampak memberikan jaminan bagi priyayi dari lingkungan kaum abangan suatu kunci menuju perpaduan baru yang mereka anggap sebagai dasar bagi peremajaan kembali kebudayaan, kelas dan masyarakat mereka. Hal ini menjadi wajar karena terjadi stagnasi dari proses perkembangan budaya Jawa. Perkembangan bahasa sebagai alat pergaulan pada masa pergerakan telah beralih kepada bahasa Melayu. Bahkan bahasa Melayu selama berabad-abad telah digunakan sebagai lingua franca. Kesastraan baru mulai tumbuh dan berkembang bukan dari bahasa Jawa sehingga tidak membawa implikasi dominasi suku Jawa.[55] Para elit Jawa berusaha memperbaiki masyarakat Jawa melalui pendidikan Belanda.

Menurut Benedict R. Anderson, Jawa terutama kerajaan-kerajaannya telah mengalami dua krisis yang telah disangga bersama-sama oleh orang Jawa dan rakyat-rakyat terjajah lainnya. Pertama adalah krisis politiko-kultural dimana sejak permulaan abad ke-17 para penguasa Jawa benar-benar telah mengalami serangkaian kesalahan, kehinaan dan bencana yang hampir-hampir tak kunjung henti. Sejak akhir abad ke-18 raja-raja Pakubuwono, Hamengkubuwono dan Mangkunegoro, semuanya telah menjadi raja-raja kecil yang “berkuasa” dengan perkenan belanja dan bertahan hidup secara ekonomi demi subsidi Belanda. Ketidakmampuan golongan elit Jawa membebaskan ketertindasan rakyat dari belenggu penjajahan diungkapan

[55] Ibid., 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara gamblang oleh pujangga Keraton Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha yaitu: *"Ratune ratu utama, Patihe patih linuwih, Pra nayaka tyas raharja, Panekare becik-becik, Parandene tan dadi, Paliyasing kalabendu…."*.[56] (Rajanya raja utama, Perdana menterinya tegak dalam kebenaran, Bupatinya konstan hati, Pembantunya sempurna, Namun tak seorang pun tetap tinggal, Zaman malapetaka).

Bait ini menunjukkan bahwa bahkan seorang raja yang turun menurun sempurna pun sekarang tidak mampu lagi untuk memenuhi tugas lamanya yang telah dirumuskannya sendiri yaitu guna mencegah kalabendu. Raja hanya mampu menunjukan kekuasaannya melalui berbagai politik simbol yang dipergunakan melalui berbagai gaya hidup, karya sastra, dan upacara-upacara yang dibesarkan melalui mitos-mitos.

Krisis kedua adalah krisis sastra dan bahasa yang menurut Benedict R. Anderson disebabkan kehancuran kerajaan Majapahit dan kehancuran peradaban pesisir Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Kehancuran dua kebudayaan ini dianggap sebagai jaman kegelapan Jawa yang pekat karena terobek-robek oleh berbagai macam peperangan, pembuangan, perampokan, pembantaian dan kelaparan.[57]

Para elit Jawa memandang bahwa kebudayaan Jawa dilandasi terutama oleh ilham Hindu-Budha, mengisyaratkan bahwa sebagian penyebab kemerosotan masyarakat Jawa adalah kedatangan Islam. Para nasionalis Jawa

---

[56] Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), 29.
[57] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini secara umum tidak menerima Islam yang lebih reformis dan cenderung melihat masa Majapahit pra Islam sebagai zaman keemasan. Hasil dari pekerjaan arkeologi yang didanai pemerintah, termasuk pembangunan kembali candi-candi pra Islam yang sangat Indah dan penerbitan teks-teks Jawa kuno oleh para sarjana filologi telah membuat Jawa pra Islam dikenal baik. Hal ini menggambarkan titik tertinggi peradaban Jawa klasik dan merangsang bangkitnya sentimen nasionalis Jawa.

Para elit Jawa dan tokoh-tokoh nasionalis Jawa kerap kali berada di balik berbagai pelecehan terhadap Islam. Misalnya, mereka menyebut ke Boven Digul lebih baik daripada ke Makkah, mencela syariat poligami, dan menyebut agama Jawa *(Gomojowo)* atau Kejawen lebih baik daripada Islam. Penghinaan-penghinaan tersebut dilakukan secara sadar melalui tulisan-tulisan di media massa dan ceramah-ceramah di perkumpulan mereka.

Kerenggangan Jawa dan Islam semakin terlihat ketika pada bulan Januari 1918, surat kabar Djawi Hiswara koran yang dipimpin oleh Martodharsono menerbitkan sebuah artikel dalam sebuah bahasa Jawa yang ditulis Djojodikoro.[58] Koran Djawi Hiswara terbit dalam dua bahasa Jawa dan Melayu. Artikel ini berjudul "Percakapan antara Marto dan Djojo". Menjelang akhir percakapan, Marto menganalogikan bahwa wujud Allah adalah seperti angin yang tak berwujud. Sebelum melanjutkan percakapan kembali tentang Allah, mereka beristirahat. Djojo merokok dan meminum-

[58] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman keras (ciu) sebagai penghangat badan. Di akhir percakapan Djojo berkata:

"inggih mangsuli bab badhe angrembag Gusti Allah rehning sampundalu punapa boten prayogi enjing-enjing kemawon, sarta mawi pirantos wilujwngan sekul wuduk, ciu, lan klelet, Gusti Kanjeng Nabi Rasul Sallaluhualihi wassalam, kados sabataning tiyang dipun wejang (maguru).[59]

(Ya, kembali pada pembicaraan tentang Gusti Allah, karena sudah malam sebaiknya besok pagi saja dengan perlengkapan selametan, nasi uduk, minuman ciu dan tembakau, Gusti Kanjeng Nabi Rasul SAW, seperti kebanyakan orang dinasehati).

Percakapan ini rupanya diambil dari sebuah karya sastra Jawa yang sangat terkenal mengenai ilmu makrifat dan Kejawen yaitu Suluk Gatoloco. Tokoh dalam serat ini yaitu Gatoloco merupakan seorang yang buruk rupa yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Ia suka menghisap candu dan menganggap dirinya adalah utusan Tuhan. Percakapan Marto dan Djojo hampir tidak jauh berbeda dengan isi serat tersebut yaitu percakapan mengenai keberadaan Tuhan dan penggunaan candu serta minuman keras oleh para pelakunya.[60]

Perkataan Djojo bahwa untuk membicarakan mengenai Tuhan maka harus dilengkapi dengan perlengkapan *slametan* yaitu nasi uduk, minuman ciu dan tembakau sesuai dengan nasehat Gusti Kanjeng Nabi Rasul S.A.W. Hal ini juga menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat Jawa yang menganut

[59] Djojodikoro, "Percakapan antara Marto dan Djojo", Djawi Hiswara (11 Januari 1918).
[60] Ibid., 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

javanism, bahwa *slametan* merupakan ritual untuk menyembah Allah, dan memberikan berbagai sesaji sebagai syaratnya. Perkataan-perkataan dalam percakapan tersebut menimbulkan polemik bagi kalangan umat Islam dan menganggap apa yang tertulis dalam artikel tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam karena dalam agama Islam minuman beralkohol dan candu adalah haram hukumnya.[61]

[61] Ibid., 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id